

## MEMBANGUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LEMBAGA PAUD

Nan Rahminawati<sup>✉</sup>

Pendidikan Guru PAUD, Universitas Islam Bandung  
DOI: 10.29313/ga:jpaud.v7i1.12835

### Abstrak

Akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat menentukan pada kualitas lembaga PAUD. Namun masih banyak lembaga PAUD yang masih terakreditasi C, sehingga diperlukan beberapa tahapan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lembaga PAUD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti berupaya untuk menggambarkan peristiwa dan kejadian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap mereka. Hasil dari penelitian ini memberikan informasi bahwa masih banyak lembaga PAUD yang memiliki akreditasi C dan hanya sedikit lembaga PAUD yang memiliki akreditasi A. Lebih dari 90% lembaga PAUD membutuhkan tahapan untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) pada lembaga PAUD. Proses Implementasi SPMI di lembaga PAUD dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan Pemetaan mutu, Penyusunan rencana peningkatan mutu berdasarkan pemetaan mutu, Pelaksanaan rencana peningkatan mutu meliputi kegiatan pengelolaan lembaga PAUD dan kegiatan proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu, dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Diakhiri dengan Penetapan standar mutu baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu.

**Kata Kunci:** Membangun; SPMI; Lembaga PAUD.

---

Copyright (c) 2023 Nan Rahminawati.

✉ Corresponding author :

Email Address: [nan@unisba.ac.id](mailto:nan@unisba.ac.id)

Received April 07, 2023, Accepted July 22, 2023. Published July 24, 2023.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengatur standar mutu pada pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 yang disebut Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SN PAUD). Setiap institusi pendidikan anak usia dini (TK/RA, KB/TPA) wajib mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan SN PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharuskan setiap Lembaga PAUD untuk melakukan penilaian yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD (BAN PAUD) guna memperoleh informasi tentang sejauh mana kualitas pendidikan Lembaga tersebut telah memenuhi Standar mutu yang telah ditetapkan (Edward Sallis, 2007).

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa: Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (Kementerian Riset, Teknologi, 2016). Dalam bagian lain, pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, disebutkan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Hal ini berarti bahwa setiap program lembaga pendidikan, baik yang tergolong dalam pendidikan formal maupun nonformal, harus ditingkatkan agar dapat mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Hanum Asrohah, 2014).

Data nasional yang dirilis oleh BAN-PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat total 34.763 lembaga PAUD yang telah mendapatkan akreditasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 2.972 lembaga PAUD yang mendapatkan nilai akreditasi A, 20.322 lembaga PAUD mendapatkan nilai akreditasi B, 11.422 lembaga PAUD mendapatkan nilai akreditasi C, dan terdapat 44 lembaga PAUD yang belum mendapatkan nilai akreditasi. Data yang diperoleh dari BAN-PAUD dan PNF Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa terdapat total sebanyak 4.906 lembaga PAUD yang tercatat. Sebagai informasi lebih lanjut, berikut adalah rincian berdasarkan nilai akreditasi yang telah diperoleh. Untuk institusi yang meraih nilai akreditasi A, ada sebanyak 306 lembaga PAUD. Kemudian, terdapat 2.890 lembaga PAUD yang memperoleh nilai akreditasi B. Selain itu, ada 1.772 lembaga PAUD yang mendapatkan nilai akreditasi C. Terakhir, terdapat 1 lembaga PAUD yang belum terakreditasi (Ban PAUD dan PNF, 2019). Secara keseluruhan, rata-rata nilai akreditasi lembaga PAUD di tingkat nasional adalah B sebesar 58,45% dan nilai akreditasi C sebesar 34,76%. Di tingkat provinsi Jawa Barat, akreditasi lembaga PAUD memiliki nilai B sebesar 58,16% dan nilai akreditasi C sebesar 35,7%. Berdasarkan data di atas, jumlah lembaga yang masih mendapatkan nilai akreditasi C cenderung tinggi jumlahnya dikarenakan kurangnya kesiapan Lembaga PAUD dalam memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Akibat langsung dari nilai akreditasi yang rendah adalah penurunan jumlah siswa yang mendaftar, karena orangtua telah menyadari pentingnya memilih Lembaga PAUD dengan akreditasi "A".

Sistem penjaminan mutu (SPM) pada tingkat PAUD telah mulai dirancang sejak tahun 2015 dan diterapkan secara eksternal oleh BAN PAUD. Namun, untuk mendukung pelaksanaan akreditasi secara eksternal, perlu didukung dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI yang dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan pada setiap Lembaga PAUD akan membantu menyelenggarakan proses kegiatan Lembaga PAUD yang berkualitas, serta mendukung terlaksananya akreditasi secara eksternal. Proses akreditasi dilakukan untuk menentukan kriteria kecocokan program dan lembaga pendidikan dalam pendidikan formal dan nonformal di semua jenjang dan jenis pendidikan. Hasil akreditasi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Akreditasi A, Akreditasi B, dan Akreditasi C. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 pasal 2 ayat 2, dimana disebutkan bahwa evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi dilakukan untuk memastikan dan mengawasi kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh karenanya sistem penjaminan mutu PAUD diperlukan agar dapat mendukung pencapaian Standar Nasional PAUD.

Data terkait pentingnya Lembaga PAUD melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, diawali dengan pelaksanaan survei yang bertujuan untuk mengevaluasi kebutuhan akan penilaian

mutu pendidikan anak usia dini (PAUD). Dari 59 orang Kepala Sekolah, sebanyak 58 orang Kepala Sekolah menyatakan bahwa lembaga PAUD membutuhkan adanya sistem penjaminan mutu internal. Hal ini menjadi alasan kuat bagi tim peneliti untuk mengembangkan suatu sistem penjaminan mutu internal di Lembaga PAUD. Juga sebanyak 55 orang Kepala Sekolah menyatakan pentingnya memiliki dokumen yang harus disiapkan sebagai dokumen sistem penjaminan mutu internal yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya. (Hakim, 2022).

Sampai saat ini SPMI baru dijalankan di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Perguruan Tinggi. Pada jenjang PAUD sampai saat ini penjaminan mutu baru dikelola oleh eksternal yaitu melalui BAN PAUD. Adapun di dalam lembaga PAUD itu sendiri belum ada legal formal yang menanungi tentang implementasi SPMI. Hal ini berdampak pada kualitas Lembaga PAUD di Indonesia yang masih sangat jauh dari harapan. Oleh karena itu peneliti memandang perlu untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan tujuan setiap Lembaga PAUD mampu memenuhi standar nasional PAUD (Islami, 2018; Kusnandi, 2017; Nasehuddin, 2022; Sagala S., 2009; Zahrok, 2020). Agar Lembaga PAUD menjadi lebih baik, perlu dilakukan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Anak Usia Dini (SPMI PAUD). Pengembangan SPMI PAUD sangat penting karena persaingan antar lembaga akan semakin kompetitif di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, seperti yang dijelaskan oleh McMillan dalam penelitian deskriptif, peneliti berupaya untuk menggambarkan peristiwa dan kejadian tanpa memberikan perlakuan khusus. Salah satu langkah yang dilakukan dalam prosedur penelitian adalah mengidentifikasi masalah. Pembatasan masalah adalah tentang penilaian akreditasi Lembaga TK di daerah Kabupaten Bandung Barat (Hakim, 2022).

Masalah yang difokuskan adalah seberapa besar pemahaman dan kebutuhan SPMI di lembaga PAUD. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui penyebaran angket menggunakan Format Google Form. Langkah ini perlu diambil mengingat kondisi saat ini yang mengharuskan adanya pembatasan dalam interaksi sosial. Pengolahan dan pemberian arti pada data dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan atau setelah kegiatan pengumpulan di lapangan selesai. Selanjutnya laporan dan kesimpulan penelitian telah disusun sebagai tanggapan terhadap tujuan penelitian yang ingin menganalisis sejauh mana rancangan SPMI PAUD di Lembaga TK di Kabupaten Bandung Barat.

Dalam penelitian ini, 60 kepala sekolah atau guru dari lembaga TK yang berada di Kabupaten Bandung Barat telah terlibat. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Pada studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan data melalui kajian literatur yang berkaitan dengan penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Selain itu, data primer yang terkait dengan demografi TK dan guru, serta data akreditasi sekolah juga diumpulkan. Sebuah kuesioner, diberikan melalui platform google form. Agar data hasil angket dapat dikonfirmasi, dilakukanlah wawancara untuk melakukan triangulasi data.

Pada proses analisis data, peneliti melakukan tahap deskripsi untuk menganalisis hasil jawaban angket yang terkumpul, hasil wawancara dengan pimpinan IGTK Kabupaten Bandung Barat, serta data dokumentasi primer yang diberikan kepada tim peneliti. Pada tahap reduksi, peneliti mengurangi semua informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya untuk berkonsentrasi pada masalah yang telah ditetapkan. Pada tahap triangulasi, peneliti berusaha untuk mengaitkan atau memverifikasi temuan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia biasanya dilaksanakan secara eksternal (lembaga akreditasi nasional) dan internal (oleh satuan pendidikan secara independen) (Fadhli, 2020). Sampai saat ini SPMI pada satuan Pendidikan baru dilegalkan secara formal didalam PP No.19 Tahun 2005 pasal 49 adalah pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Permendikbud, n.d.). Program ini dilaksanakan dengan memilih beberapa sekolah SD, SLTP dan SLTA untuk menjadi sekolah model bagi pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (Ridwan Abdullah Sani, 2015). Sistem penjaminan mutu ini memiliki keunggulan, yakni mutu produk yang dihasilkan terjamin dengan baik karena pencegahan kesalahan dalam proses yang dilakukan secara ketat. Tujuan melakukan penjaminan mutu pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu kinerja, memperbaiki produktivitas dan efisiensi, dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan SNP (Opan Arifudin, 2019; Sufa & Setiawan, 2020).

Penjaminan Mutu Internal diartikan dengan kegiatan evaluasi diri lembaga PAUD oleh Lembaga PAUD itu sendiri untuk memenuhi atau melampaui SN PAUD secara berkelanjutan/*continuous improvement*. SPMI bersifat mandiri (*internally driven*) tanpa campur tangan atau instruksi dari lembaga lain termasuk pemerintah (Asbeni, 2001). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu solusi permasalahan PAUD di Indonesia. SPMI bertujuan untuk menjamin mutu lembaga Pendidikan di Indonesia agar mampu menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan mutu melalui SPMI ini pada gilirannya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi satuan pendidikan melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). (Huda, 2016; Jono, 2016; Nanang Fattah, 2012; Rifai, 2015; Uhar Suharsaputra, 2010; Yahya, 2015).

Kegiatan penelitian Membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal PAUD diawali dengan studi literatur terkait peraturan perundangan-undangan yang kemudian diturunkan kedalam peraturan kementerian Pendidikan dan kebudayaan terkait Sistem Penjaminan Mutu di PAUD. Hasilnya menunjukkan pada jenjang PAUD, sama halnya seperti jenjang Pendidikan keatasnya diharuskan melaksanakan proses penjaminan mutu, yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pengawas atau penilik dari dinas Pendidikan setempat, pun diharuskan mengikuti akreditasi sekolah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD). Hasil Studi pendahuluan di Kabupaten Bandung Barat (KBB), seperti yang disampaikan oleh ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK) "Sebagian besar pihak sekolah masih kebingungan dalam menghadapi akreditasi, meskipun sudah diberikan pedoman pengisian dokumen akreditasi". Selanjutnya adalah kendala SDM dari guru dan Kepsek di wilayah KBB yang masih minim, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi yang intensif kepadanya.

Untuk mendapatkan informasi terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal PAUD, maka tim peneliti melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pihak pengurus IGTK yang diwakili oleh Ketua. Diskusi menghasilkan kesepahaman terkait. (1) standar mutu Pendidikan pada jenjang PAUD di wilayah KBB masih perlu ditingkatkan, masih banyak TK yang terakreditasi "C" dan belum terakreditasi. (2) Masih banyak sekolah yang masih kebingungan dalam menghadapi akreditasi, persiapan dari setiap Lembaga TK terkesan mendadak apabila menghadapi akreditasi, (3) perlu adanya suatu sistem penjaminan mutu internal yang dapat menuntun Lembaga PAUD dalam mencapai Standar Nasional PAUD, hal ini diharapkan memantu meningkatkan nilai mutu akreditasi Lembaga PAUD.

Berdasarkan data awal tersebut disimpulkan bahwa implementasi SPMI di lembaga PAUD sangat diperlukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber, disusunlah beberapa tahapan untuk mengimplementasikan SPMI di lembaga PAUD. Secara garis besar membangun SPMI dilalui dengan tahapan sebagai berikut:

*Pertama*, menyusun dokumen/Buku Kebijakan Mutu yang berisi (a) Visi, Misi, Tujuan Satuan PAUD (b) Latar Belakang Satuan PAUD menjalankan SPMI. (c) Ruang lingkup kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik) (d) Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI (e) Garis besar kebijakan SPMI (f) Tujuan dan Strategi SPMI (g) Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI dan (h) Manajemen SPMI (misal: Plan, Do, Check, Action); (i) Unit atau pejabat khusus

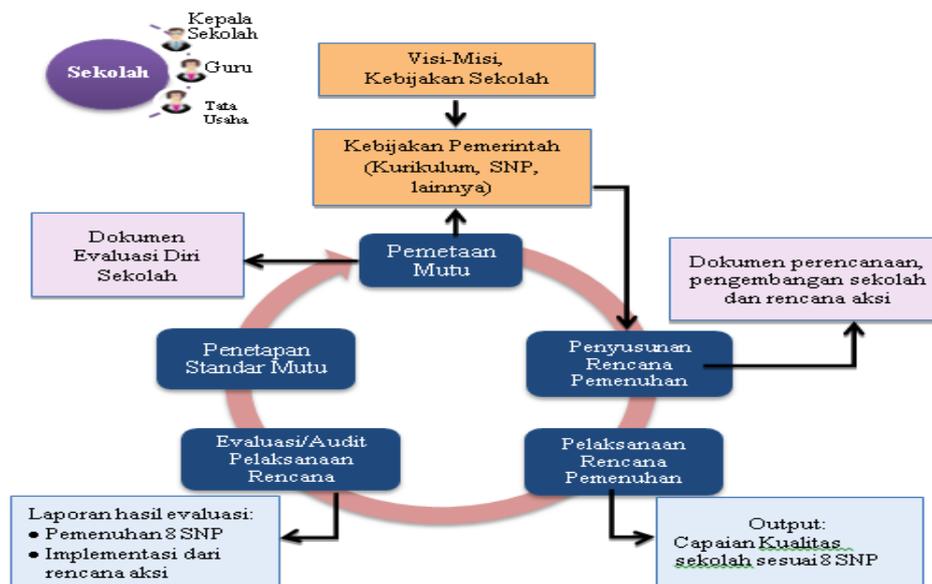
penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI) dan (j) Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, (k) Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Akreditasi PAUD yang dilaksanakan oleh BAN PAUD;

*Kedua*, menyusun dokumen/Buku Manual SPMI yang berisi (a) Tujuan dan maksud Manual SPMI. (b) Ruang lingkup Manual SPMI. (Manual Penetapan Standar; Manual Pelaksanaan Standar; Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar; Manual Peningkatan Standar.) (c) Rincian tentang hal yang harus dikerjakan pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu. (d) Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI. (e) Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI. (f) Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI;

*Ketiga*, menyusun Dokumen/Buku Standar SPMI yang berisi: (a) Definisi Istilah (istilah khas yang diinginkan agar tidak menimbulkan multi tafsir); (b) Rationale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut); (c) Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C; (d) Strategi Pencapaian Standar SPMI (bagaimana mencapai standar); (e) Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang dicapai, bagaimana mencapai, dan target pencapaian); (f) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI; dan

*Keempat*, menyusun Formulir SPMI. Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar (Rahminawati, 2021).

Implementasi SPMI PAUD mengadopsi siklus SPMI yang telah dilakukan pada pendidikan dasar melalui tahapan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Siklus Implementasi SPMI di Lembaga PAUD

Tahap pertama yaitu Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) berdasarkan Standar Nasional PAUD. Hasil dari kegiatan ini adalah peta capaian standar nasional pendidikan disatukan pendidikan. sebagai baseline, masalah-masalah yang dihadapi dan rekomendasi perbaikannya. Tujuan disusunnya analisis peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan sekolah serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan lembaga PAUD maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan berkelanjutan (Suarnaya & Murnayasa, 2019).

Tahap selanjutnya yakni Penyusunan rencana peningkatan mutu berdasarkan pemetaan mutu. Luaran dari kegiatan perencanaan ini adalah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sekolah dan Rencana Aksi yang didasarkan pada peta mutu, kebijakan Pemerintah (kurikulum dan SNP), serta rencana strategis pengembangan sekolah (Barnawi & M.Arifin, 2017). Upaya peningkatan mutu membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama, yaitu (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai.

Tahap yang ketiga yaitu Pelaksanaan rencana peningkatan mutu meliputi kegiatan pengelolaan satuan PAUD dan kegiatan proses pembelajaran. Hasil kegiatan pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu ini adalah tercapainya mutu pendidikan dan capaian Standar Nasional Lembaga PAUD yang ditetapkan (Uhar Suharsaputra, 2010). Pelaksanaan rencana peningkatan mutu juga merupakan realisasi program yang dilaksanakan oleh masing-masing devisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mana yang tertuang dalam rencana strategis masing-masing satuan lembaga PAUD (Romadlon et al., 2022).

Tahap keempat yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu, dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun baik berupa Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, proses pembelajaran dan hasilnya, dampak penjaminan mutu, keterlibatan pemangku pendidikan dan masyarakat (Romadlon et al., 2022). Luaran kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan pemenuhan standar nasional pendidikan dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Selain itu juga rekomendasi tindakan perbaikan jika di temukan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan aksi.

Dan tahap terakhir yaitu penetapan standar mutu baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu, Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, lembaga PAUD melakukan penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi dari standar baseline guna membangun budaya mutu di satuan pendidikan. (Rahminawati, 2021)

Keberhasilan SPMI di lembaga PAUD dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, indikator keluaran, meliputi kemampuan satuan pendidikan menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu serta keberadaan organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, indikator hasil, yaitu apakah proses pembelajaran serta pengelolaan satuan pendidikan sudah berjalan sesuai standar. Ketiga, indikator dampak, di antaranya terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan serta adanya peningkatan mutu hasil belajar. Terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan pelaksanaan SPMI di lembaga PAUD, yaitu budaya organisasi, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, partisipasi pemangku kepentingan, komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan, akuntabilitas, transparansi, dan integritas (Barnawi & M.Arifin, 2017).

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil analisis terkait pengetahuan para kepala sekolah terhadap Sistem Penjaminan Mutu di Lembaga PAUD, menunjukkan para kepala sekolah memerlukan adanya sistem penjaminan mutu internal PAUD. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibuatkan suatu sistem penjaminan mutu Internal, dimana SPMI ini dapat dijadikan sebagai bahan pemetaan mutu, penyiapan dokumen mutu dan pemenuhan dokumen mutu lembaga.

Proses Implementasi SPMI di lembaga PAUD dilakukan dengan beberapa tahap pertama Pemetaan mutu, Penyusunan rencana peningkatan mutu berdasarkan pemetaan mutu, Pelaksanaan rencana peningkatan mutu meliputi kegiatan pengelolaan satuan PAUD dan kegiatan proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu, dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun. serta terakhir adalah Penetapan standar mutu baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu.

Keberhasilan SPMI di lembaga PAUD dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, indikator keluaran, meliputi kemampuan satuan pendidikan menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu serta keberadaan organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, indikator

hasil, yaitu apakah proses pembelajaran serta pengelolaan satuan pendidikan sudah berjalan sesuai standar. Ketiga, indikator dampak, di antaranya terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan serta adanya peningkatan mutu hasil belajar

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba serta Jurnal Golden Age Prodi PG PAUD Unisba yang telah memberikan kesempatan untuk menuliskan artikel pada platform yang telah disediakan. Serta kepada pihak LPPM Unisba yang telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asbeni. (2001). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas. *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura, Vol 1, No 0001 (2013): ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, 1–19. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/view/4150>
- Barnawi & M.Arifin. (2017). Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. In *Ar-Ruz& Media*.
- Edward Sallis. (2007). *Total Quality Management in Education Manajemen Mutu Pendidikan*. Ircisod.
- Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Ekstenal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 53–65. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148>
- Hakim, A. dkk. (2022). Analisis Tingkat Kebutuhan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1605–1614.
- Hanum Asrohah. (2014). *Manajemen Mutu Pendidikan*. UIN Sunan Ampel Press.
- Huda, K. (2016). Problematika Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Dinamika Penelitian*, 16(2). <https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.2.309-336>
- Islami, N. (2018). Desain Sistem Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Tk). *Early Childhood: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 31–46.
- Jono, A. A. (2016). Studi Implementasi Kurikulum Berbasis Kkni Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di Lptk Se-Kota Bengkulu. *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 57–68. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/148>
- Kementerian Riset, Teknologi, dan P. T. (2016). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Dikti. *Dikti*.
- Kusnandi. (2017). Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 1(2), 107–118.
- Nanang Fattah. (2012). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Nasehuddin, D. (2022). IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MTSN 5. *Edulead : Journal of Education*, 4, 56–73.
- Opan Arifudin. (2019). MANAJEMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI. *Manajemensistem Penjaminan Mutuinternal (Spmi)Sebagai Upayameningkatkan Mutu Perguruan Tinggi*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp161-169>
- Permendikbud. (n.d.). *Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah*.
- Rahminawati, N. (2021a). *Implementasi Sismtem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Dasar*. Unisba Press.
- Rahminawati, N. (2021b). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 4(3), 212–219. <https://doi.org/10.17977/um027v4i32021p212>
- Ridwan Abdullah Sani. (2015). *Penjaminan Mutu Sekolah*. PT Bumi Aksara.
- Rifai, A. (2015). Peningkatan Capaian Standar Nasional Pendidikan Melalui Model Penjaminan Mutu Internal SMK. *Jurnal Pendidikan*, VI(1), 1–8. <http://lppmpjogja.kemdikbud.go.id/wp->

content/uploads/2017/03/April-2015-1.pdf

- Romadlon, D. A., Bagus, A., & Kurniawan, H. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Dasar. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3(c), 678–685.
- Sagala S. (2009). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Alfabeta.
- Suarnaya, I. K., & Murnayasa, I. W. (2019). Peta Mutu Pendidikan. In *Blogspot.Com*. <http://tankaedukasi.blogspot.com/2016/10/pengembangan-peta-mutu-pendidikan.html>
- Sufa, F. F., & Setiawan, M. H. Y. (2020). Implementasi Penjaminan Mutu pada Lembaga PAUD di Solo Raya. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 559. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.408>
- Uhar Suharsaputra. (2010). *Administrasi Pendidikan*. PT. Rafika Aditama.
- Yahya, F. A. (2015). PROBLEM MANAJEMEN PESANTREN, SEKOLAH DAN MADRASAH: Problem Mutu dan Kualitas Input-Proses-Output. *El-Tarbawi*, 8(1), 93–109. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art6>
- Zahrok, A. L. N. (2020). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(2), 196–204. <https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.31288>